



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pangkalpinang, 1 April 2024

Nomor : 210 /KPTUN.W5-TUN5/HK2.7/IV/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Indeks Persepsi Korupsi  
Periode Januari s.d. Maret 2024

Kepada Yth:

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara  
Di - Jakarta 10510

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka kami kirimkan Laporan Indeks Persepsi Korupsi periode Periode Januari s.d. Maret 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,



**RONI ERRY SAPUTRO**

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang di Palembang
2. Arsip.

**LAPORAN**  
**SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**  
**PERIODE JANUARI S.D. MARET**  
**TAHUN 2024**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi  
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi  
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Disahkan di Pangkalpinang  
Pada hari Senin, 1 April 2024

Ketua PTUN Pangkalpinang ,



**RONI ERRY SAPUTRO**  
NIP.197706282001121003

Sekretaris Tim Survei,



**BOBY CAHYADI**  
NIP.197711271999031003

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi anti korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pangkalpinang, 1 April 2024  
Sekretaris Tim Survei,



**BOBY CAHYADI**  
NIP. 197711271999031003

## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Maksud Dan Tujuan .....	2
1.3.Landasan Hukum .....	2
1.4.Rencana Kerja.....	2
BAB II .....	4
METODOLOGI .....	4
2.1. Metode Penelitian .....	4
2.2. Populasi Dan Sampel .....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	5
2.5. Teknik Analisis Data .....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan .....	6
BAB III .....	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI .....	8
3.1.Profil Responden .....	8
3.2.Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator .....	12
3.3.Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang .....	22
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan.....	25
BAB IV.....	25
PENUTUP .....	25
4.1.Kesimpulan.....	25
4.2.Rekomendasi.....	25
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPK .....	6
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	6
Tabel 3. Nilai Persepsi Indeks Persepsi Anti Korupsi .....	7
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden .....	8
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden.....	9
Tabel 6. Domisili Responden.....	10
Tabel 7. Usia Responden .....	11
Tabel 8. Indeks pada Koordinator Manipulasi Peraturan .....	12
Tabel 9. Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan .....	13
Tabel 10. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh .....	14
Tabel 11. Indeks pada Indikator Transaksi biaya.....	15
Tabel 12. Indeks pada Indikator Biaya Tambahan .....	16
Tabel 13. Indeks pada Indikator Hadiah .....	17
Tabel 14. Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran .....	18
Tabel 15. Indeks pada Indikator Percaloan .....	19
Tabel 16. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang .....	20
Tabel 17. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia .....	21
Tabel 18. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	22
Tabel 19. Nilai Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	22

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden.....	8
Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden.....	9
Grafik 3. Domisili Responden.....	10
Grafik 4. Rentang Usia Responden.....	11
Grafik 5. Manipulasi Peraturan.....	12
Grafik 6. Penyalahgunaan Jabatan.....	13
Grafik 7. Menjual Pengaruh.....	14
Grafik 8. Transaksi Biaya.....	15
Grafik 9. Biaya Tambahan.....	16
Grafik 10. Hadiah.....	17
Grafik 11. Transparansi Pembayaran.....	18
Grafik 12. Percaloan.....	19
Grafik 13. Perbuatan Curang.....	20
Grafik 14. Transaksi Rahasia.....	21
Grafik 15. Indeks Persepsi Korupsi.....	23

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang besar.

Pengadilan tingkat pertama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan tingkat banding untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Anti Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

## **1.4. Rencana Kerja**

### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan sumber daya manusia yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan/ triwulan (4 kali dalam satu tahun).

## BAB II METODOLOGI

### 2.1. **Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### 2.2. **Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Teknik sampling yang penulis gunakan adalah teknik non random sampling yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian kualitatif tidak di maksudkan untuk menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, akan tetapi lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Menelusuri data seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Metode penentuan sampel jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

### 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dalam hal ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### 2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan. Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan memeriksa pekerjaan petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

### 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

**Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPK**



**Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi**

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3. Nilai Persepsi Indeks Presepsi Anti Korupsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPAK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**3.1. Profil Responden**

**3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden**

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa mayoritas latar belakang pendidikan pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki latar pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Tinggi.

**Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden**

No.	Jenis pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Tidak sekolah	0	-
2.	SD	1	9%
3.	SMP	0	-
4.	SMA/SLTA	7	64%
5.	DIPLOMA	0	-
6.	S1	3	27%
7.	S2	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



**Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden**

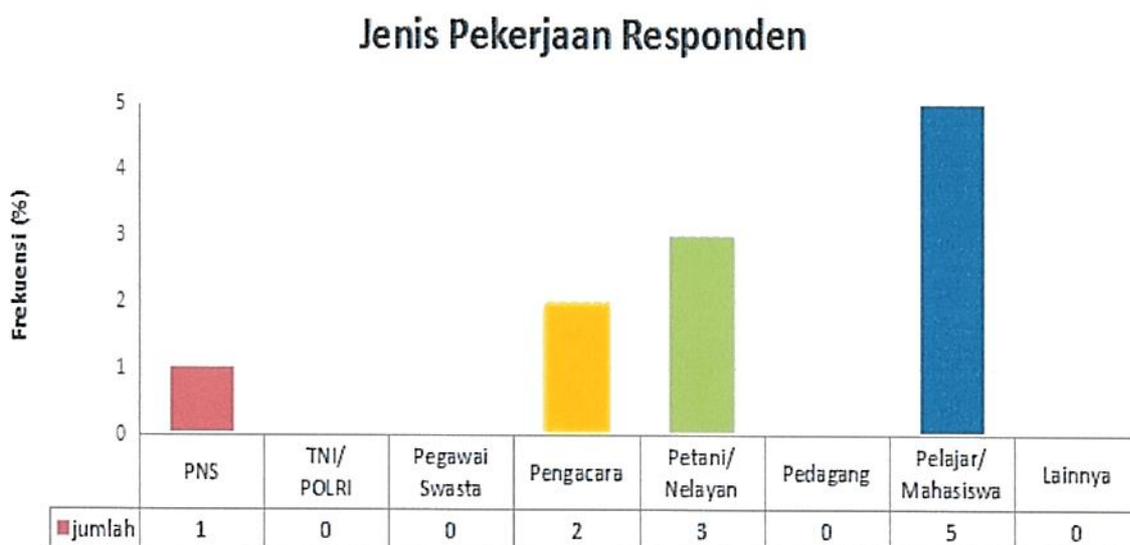
### 3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden menunjukkan bahwa sebesar 45 % responden pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa, 27% Petani/Nelayan dan 18 % responden memiliki pekerjaan sebagai Pengacara.

**Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden**

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	PNS	1	9%
2.	TNI/POLRI	-	-
3.	Pegawai Swasta	-	-
4.	Pengacara	2	18%
5.	Petani/ Nelayan	3	27%
6.	Pedagang	-	-
7.	Pelajar/ Mahasiswa	5	45%
8.	Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



**Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden**

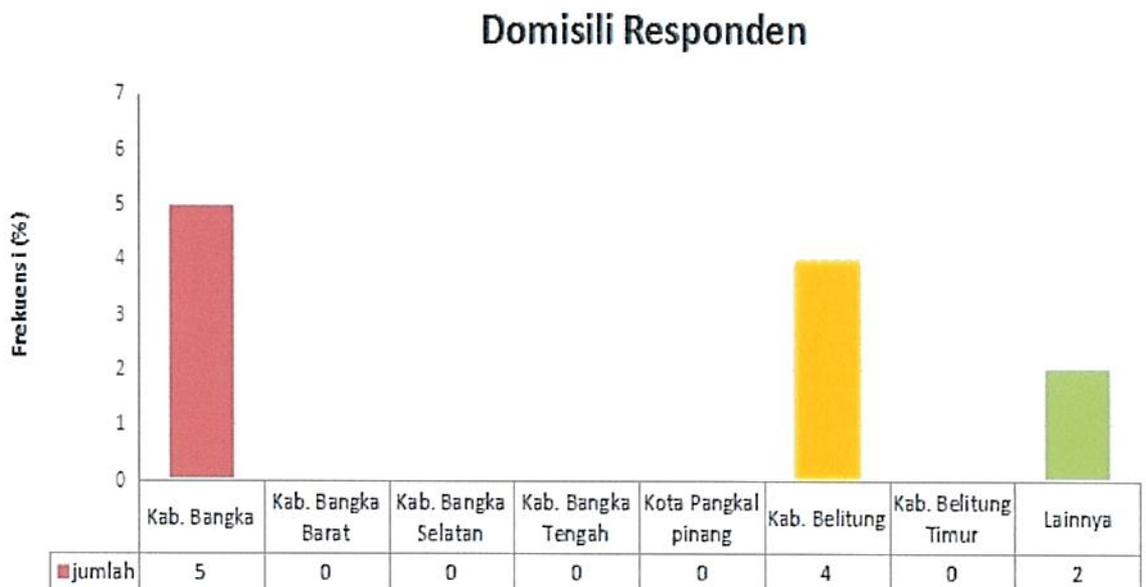
### 3.1.3. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama periode survei Indeks Persepsi Korupsi Bulan Januari-Maret Triwulan I 2024 diperoleh data bahwa pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan domisili 45 % berasal dari Kabupaten Bangka, 36% Kabupaten Belitung dan 2% berasal dari Jakarta.

**Tabel 6. Domisili Responden**

No.	Domisili	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Kab. Bangka	5	45%
2.	Kab. Bangka Barat	-	-
3.	Kab. Bangka Selatan	-	-
4.	Kab. Bangka Tengah	-	-
5.	Kota Pangkalpinang	-	-
6.	Kab. Belitung	4	36%
7.	Kab. Belitung Timur	-	-
8.	Lainnya	2	18%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



**Grafik 3. Domisili Responden**

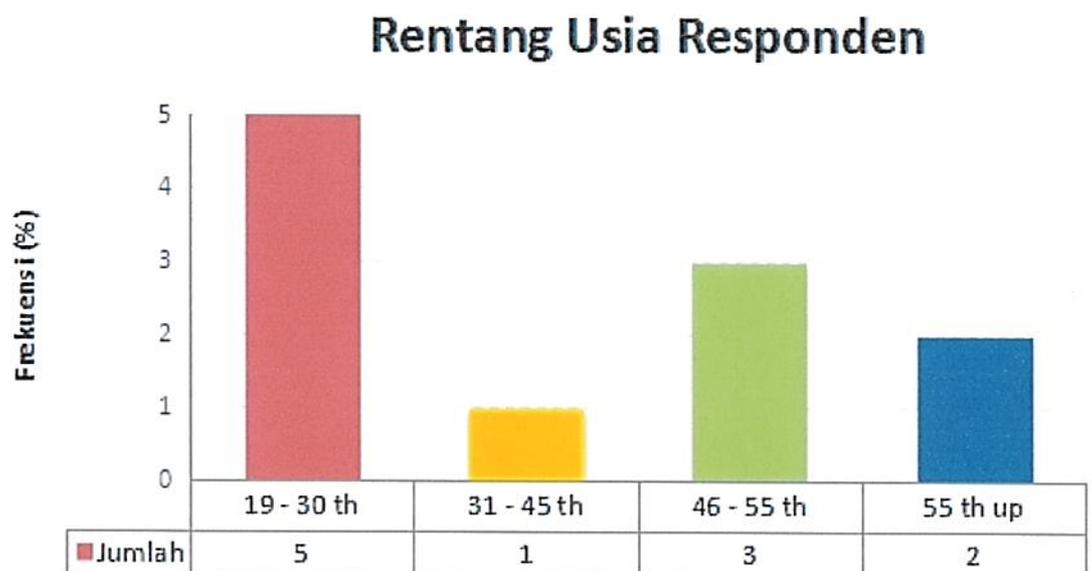
### 3.1.4. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu usia antara 19-30 tahun.

**Tabel 7. Usia Responden**

No.	Rentang Usia	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	19 - 30 th	5	45%
2.	31 - 45 th	1	9%
3.	46 - 55 th	3	27%
4.	55 th up	2	18%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



**Grafik 4. Rentang Usia Responden**

### 3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4 hasil persepsi responden Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih dari Korupsi.

**Tabel 8. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan**

No.	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	-	-
4.	Tidak Sesuai	11	100%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 5. Manipulasi Peraturan**

### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

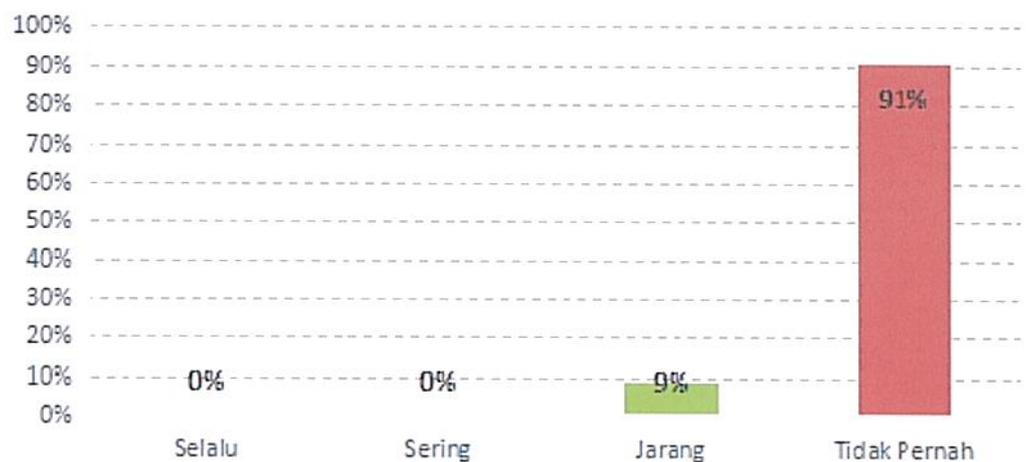
Dari skala 1 sampai 4 hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih dari Korupsi.

**Tabel 9. Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

No.	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	-
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	1	9%
4.	Tidak Pernah	10	91%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

### Penyalahgunaan Jabatan



**Grafik 6. Penyalahgunaan Jabatan**

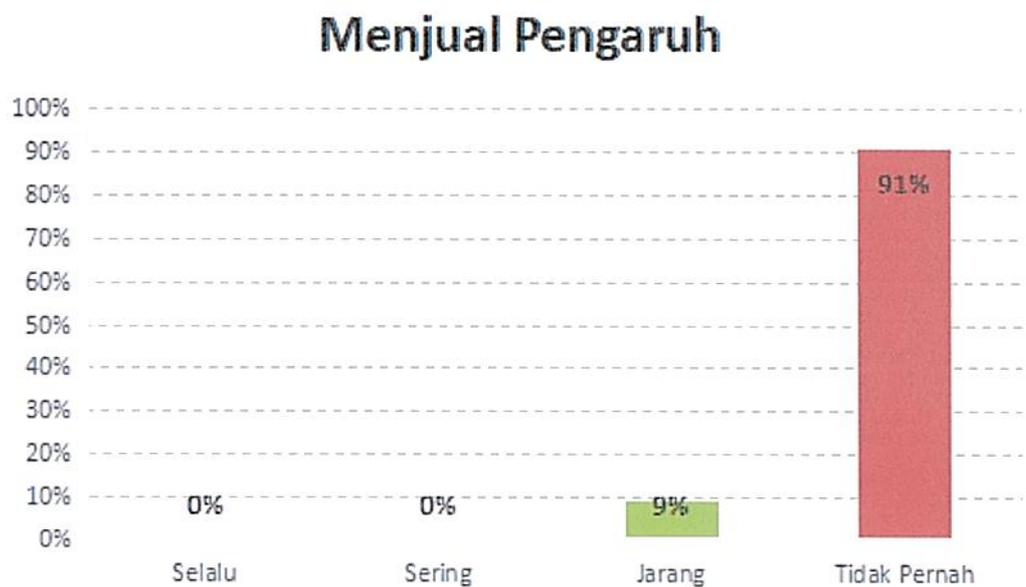
### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih dari Korupsi.

**Tabel 10. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh**

No.	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	-
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	1	9%
4.	Tidak Pernah	10	91%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



**Grafik 7. Menjual Pengaruh**

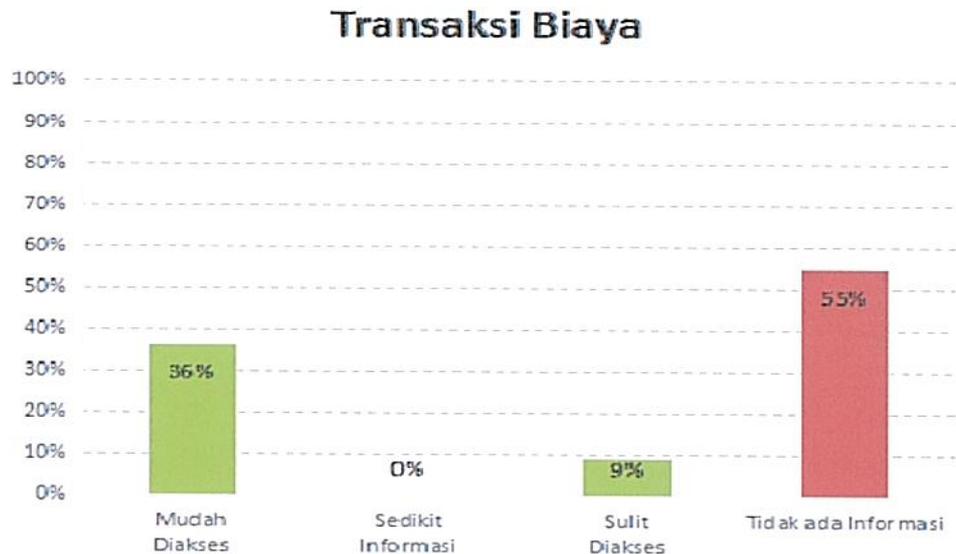
### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 2,82. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Cukup Bersih dari Korupsi.

**Tabel 11. Indeks pada Indikator Transaksi Biaya**

No.	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Mudah Diakses	4	36%
2.	Sedikit Informasi	0	-
3.	Sulit Diakses	1	9%
4.	Tidak ada Informasi	6	55%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



**Grafik 8. Transaksi Biaya**

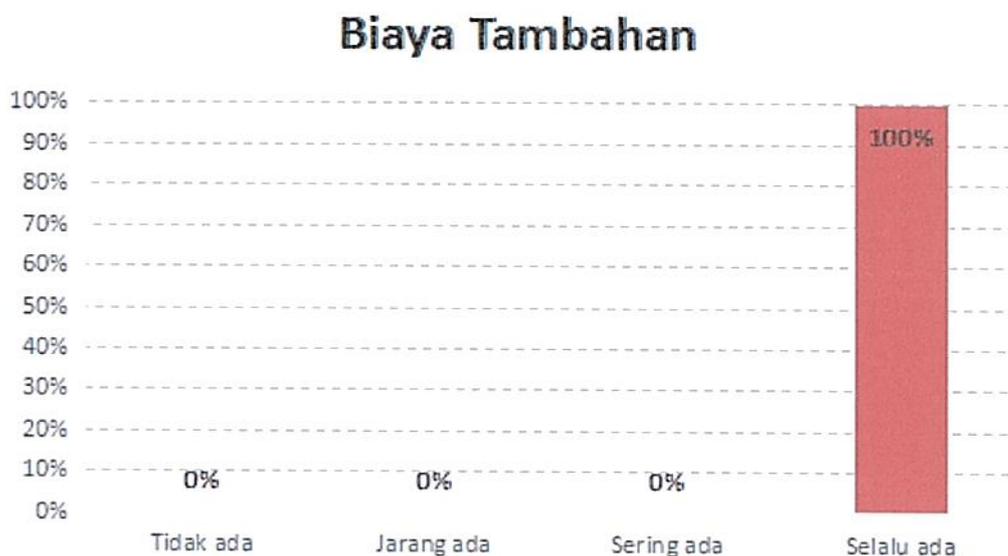
### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih dari Korupsi.

**Tabel 12. Indeks pada Indikator Biaya Tambahan**

No.	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	-
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	0	-
4.	Tidak ada	11	100%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



**Grafik 9. Biaya Tambahan**

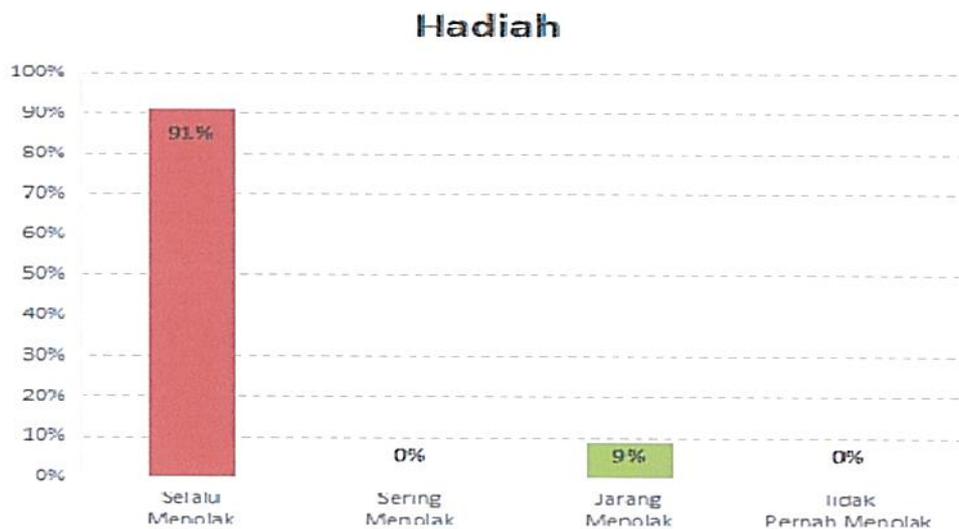
### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,82. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih dari Korupsi.

**Tabel 13. Indeks pada Indikator Hadiah**

No.	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu Menolak	10	91%
2.	Sering Menolak	0	-
3.	Jarang Menolak	1	9%
4.	Tidak Pernah Menolak	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



**Grafik 10. Hadiah**

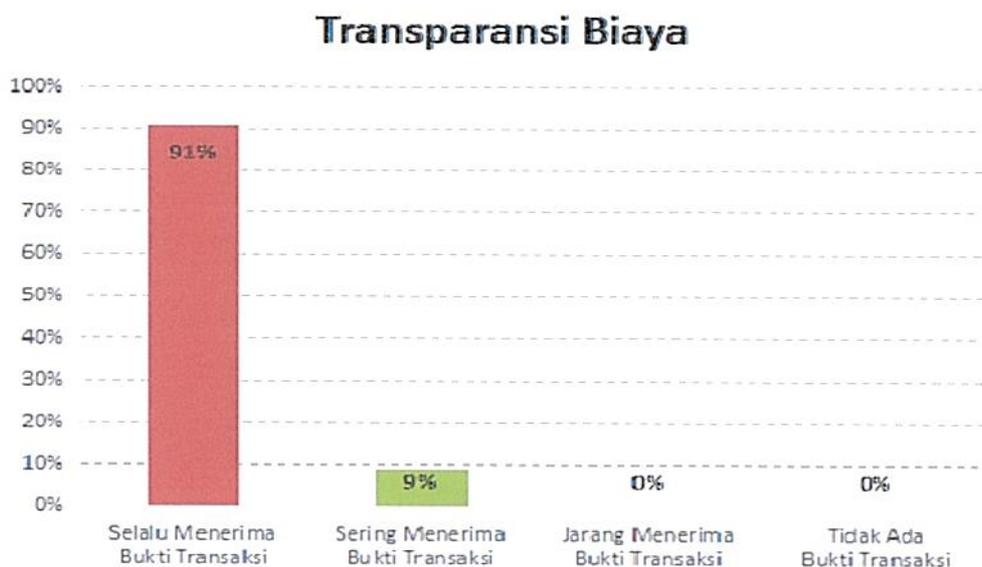
### 3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih dari Korupsi.

**Tabel 14. Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran**

No.	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu Menerima Bukti Transaksi	0	-
2.	Sering Menerima Bukti Transaksi	0	-
3.	Jarang Menerima Bukti Transaksi	1	9%
4.	Tidak Ada Bukti Transaksi	10	91%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



**Grafik 11. Transparansi Pembayaran**

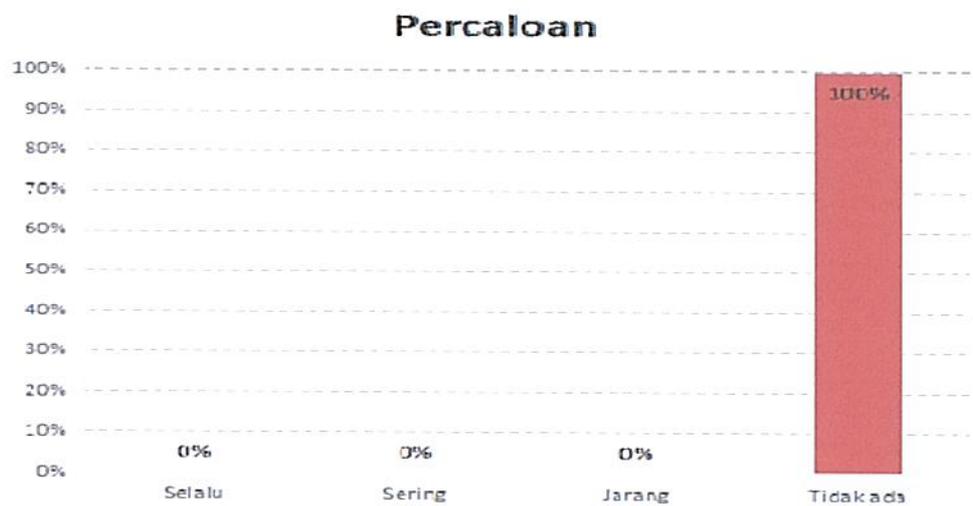
### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih dari Korupsi.

**Tabel 15. Indeks pada Indikator Percaloan**

No.	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	-
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	0	-
4.	Tidak ada	11	100%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



**Grafik 12. Percaloan**

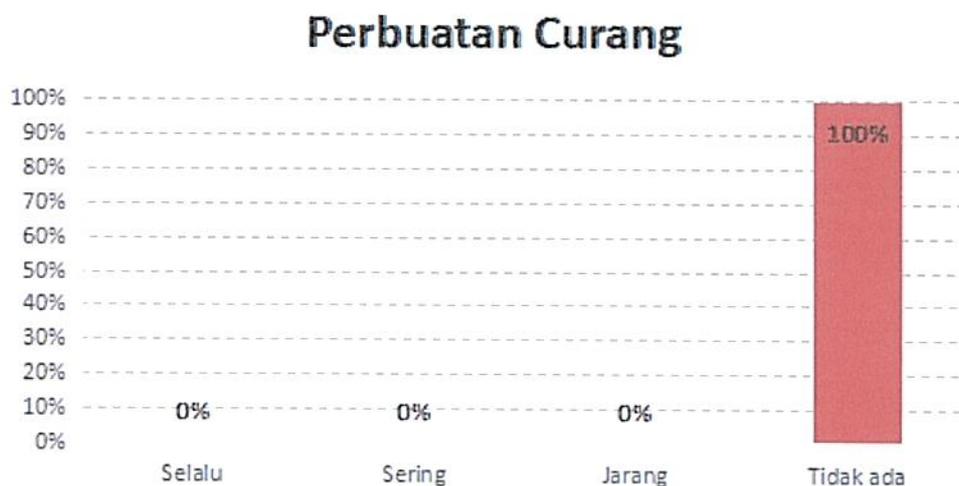
### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih dari Perbuatan Curang.

**Tabel 16. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang**

No.	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	-
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	0	-
4.	Tidak ada	11	100%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



**Grafik 13. Perbuatan Curang**

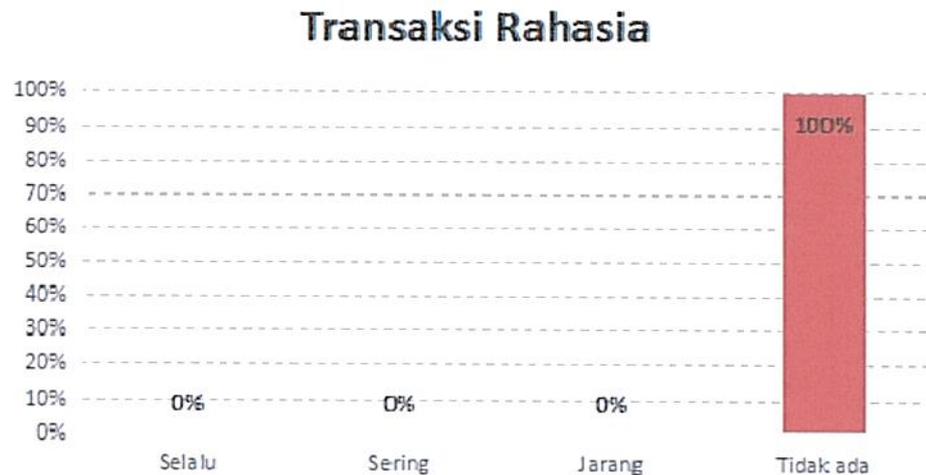
### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih dari Korupsi.

**Tabel 17. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia**

No.	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	-
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	0	-
4.	Tidak ada	11	100%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



**Grafik 14. Transaksi Rahasia**

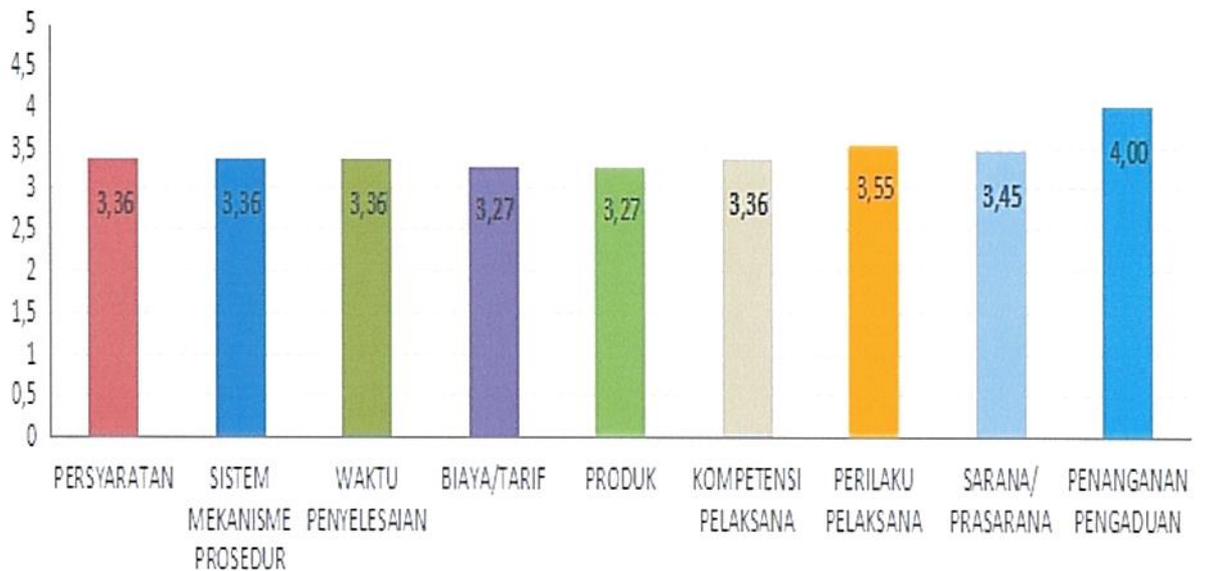
### 3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dari 10 indikator Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh, Transaksi Biaya, Biaya Tambahan, Hadiah, Transparansi Pembayaran, Percaloan, Perbuatan Curang, Transaksi Rahasia, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebesar 3,84.

**Tabel 18. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang**

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Presentase (%)
Q1	Manipulasi Data	4.00	100
Q2	Penyalahgunaan Jabatan	3.91	97,73
Q3	Menjual Pengaruh	3.91	97,73
Q4	Transaksi Biaya	2.82	70,45
Q5	Biaya Tambahan	4.00	100
Q6	Hadiah	3.82	95,45
Q7	Tranparansi Biaya	3.91	97,73
Q8	Percaloan	4.00	100
Q9	Perbuatan Curang	4.00	100
Q10	Transaksi Rahasia	4.00	100
<b>Jumlah</b>		<b>3.84</b>	95,91

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



**Grafik 15. Indeks Persepsi Korupsi**

Indeks 3,84 jika dikonversikan ke dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100.

**Tabel 19. Nilai Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25.00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	4	Bersih dari korupsi

#### **3.4. Persepsi responden terhadap Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,84 atau masuk pada Kategori Bersih Dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,91.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,91.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 2,82.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,82.
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,91.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat Indeks 4,00.

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,8 atau masuk pada Persepsi Bersih Dari Korupsi. Namun dari 10 (sepuluh) indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya, berdasarkan hasil survei didapatkan bahwa baik melalui website atau petugas layanan kurangnya informasi tentang tarif/biaya yang diperoleh oleh para pencari keadilan, sehingga untuk petugas layanan harus ditingkatkan kompetensi penyampaian informasi kepada para pencari

keadilan, dan dalam upaya peningkatan kompetensi petugas layanan agar terus dilakukan monitoring dan evaluasi berkala kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan memberikan pelatihan baik pelatihan internal maupun pelatihan dari eksternal tentang pelayanan untuk petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sedangkan terkait kurangnya penyediaan informasi tentang tarif/biaya di website atau platform media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, akan dilakukan update informasi berkala di website atau platform media sosial, baik informasi mengenai gugatan maupun informasi tentang tarif/biaya, serta terus meningkatkan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi secara menyeluruh untuk terus meningkatkan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik utamanya penyediaan informasi tentang tarif/biaya.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

Nomor Kuesioner :  (diisi petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	ZACKY NURFADILLA
2.	Instansi/Perusahaan	:	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
3.	No. HP	:	085369357418
4.	Alamat e-Mail	:	zackynurfadilla@gmail.com
5.	Umur (tahun)	:	19 TAHUN
6.	Jenis Kelamin	:	PRIA
7.	Pendidikan terakhir	:	SMA
8.	Pekerjaan Utama	:	MAHASISWA
9.	Domisili	:	PANGKALPINANG

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK:**

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang ( ✓ ) atau tanda ( X ) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i).

**KUESIONER :**

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah Pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? <b>(Manipulasi Peraturan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? <b>(Penyalahgunaan Jabatan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (Pegawai Pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusn surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? <b>(Menjual Pengaruh)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi <input type="checkbox"/> Jarang Dihubungi <input type="checkbox"/> Sering Dihubungi <input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi
4.	Apakah Informasi tentang tarif/Biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? <b>(Transaksi Biaya)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Tidak Ada
5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? <b>(Biaya Tambahan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Jarang Ada Tambahan Biaya

	<input type="checkbox"/> Sering Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya
6.	<p>Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas pelayanan yang diterima? <b>(Hadiah)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menolak <input type="checkbox"/> Sering Menolak <input type="checkbox"/> Jarang Menolak <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Menolak
7.	<p>Apakah menerima Bukti Transaksi Keuangan/pembayaran yang Sah setelah proses pembayaran dilakukan? <b>(Transparasi Biaya)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Sering Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Jarang Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	<p>Apakah pernah mengetahui ada Praktek Percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? <b>(Percaloan)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
9.	<p>Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih ada Praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? <b>(Perbuatan Curang)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
10.	<p>Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang atau di luar prosedur? <b>(Transaksi Rahasia)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu

Kuesioner ini Mohon Diisi Untuk Meningkatkan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 8 MARET 2024



( \_\_\_\_\_ )

ZACKY NURPADILLAH



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

Nomor Kuesioner :    (diisi petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	Jowan Saputra
2.	Instansi/Perusahaan	:	Universitas Bangka Belitung
3.	No. HP	:	083803035592
4.	Alamat e-Mail	:	jowan@gmail.com
5.	Umur (tahun)	:	19 tahun
6.	Jenis Kelamin	:	laki-laki
7.	Pendidikan terakhir	:	Si hukum
8.	Pekerjaan Utama	:	mahasiswa
9.	Domisili	:	batunijuk.

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK:**

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang ( ✓ ) atau tanda ( ✗ ) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i).

**KUESIONER :**

<b>Pertanyaan-pertanyaan Survei</b>	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah Pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? <b>(Manipulasi Peraturan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? <b>(Penyalahgunaan Jabatan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (Pegawai Pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusn surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? <b>(Menjual Pengaruh)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi <input type="checkbox"/> Jarang Dihubungi <input type="checkbox"/> Sering Dihubungi <input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi
4.	Apakah Informasi tentang tarif/Biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? <b>(Transaksi Biaya)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Tidak Ada
5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? <b>(Biaya Tambahan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Jarang Ada Tambahan Biaya

	<input type="checkbox"/> Sering Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya
6.	<p>Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas pelayanan yang diterima? <b>(Hadiah)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menolak <input type="checkbox"/> Sering Menolak <input type="checkbox"/> Jarang Menolak <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Menolak
7.	<p>Apakah menerima Bukti Transaksi Keuangan/pembayaran yang Sah setelah proses pembayaran dilakukan? <b>(Transparasi Biaya)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Sering Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Jarang Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	<p>Apakah pernah mengetahui ada Praktek Percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? <b>(Percaloan)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
9.	<p>Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih ada Praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? <b>(Perbuatan Curang)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
10.	<p>Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang atau di luar prosedur? <b>(Transaksi Rahasia)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu

Kuesioner ini Mohon Diisi Untuk Meningkatkan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pangkalpinang, *Jumad & Maret* 2024

  
( Jovan Saputra )



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

Nomor Kuesioner :  (diisi petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	Rini Sihotang
2.	Instansi/Perusahaan	:	UBB
3.	No. HP	:	082260562440
4.	Alamat e-Mail	:	ningsihini35@gmail.com
5.	Umur (tahun)	:	19
6.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
7.	Pendidikan terakhir	:	SMA
8.	Pekerjaan Utama	:	Mahasiswa
9.	Domisili	:	Balunjuk

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK:**

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang ( ✓ ) atau tanda ( X ) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i).

**KUESIONER :**

<b>Pertanyaan-pertanyaan Survei</b>	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah Pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? <b>(Manipulasi Peraturan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? <b>(Penyalahgunaan Jabatan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (Pegawai Pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusn surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? <b>(Menjual Pengaruh)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi <input type="checkbox"/> Jarang Dihubungi <input type="checkbox"/> Sering Dihubungi <input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi
4.	Apakah Informasi tentang tarif/Biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? <b>(Transaksi Biaya)</b> <input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Jarang <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada
5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? <b>(Biaya Tambahan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Jarang Ada Tambahan Biaya

	<input type="checkbox"/> Sering Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya
6.	<p>Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas pelayanan yang diterima? (Hadiah)</p> <input type="checkbox"/> Selalu Menolak <input type="checkbox"/> Sering Menolak <input checked="" type="checkbox"/> Jarang Menolak <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Menolak
7.	<p>Apakah menerima Bukti Transaksi Keuangan/pembayaran yang Sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Sering Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Jarang Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	<p>Apakah pernah mengetahui ada Praktek Percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
9.	<p>Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih ada Praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
10.	<p>Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu

Kuesioner ini Mohon Diisi Untuk Meningkatkan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 08 - 03 - 2024

*pi*

(\_\_\_\_\_)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

Nomor Kuesioner :  (diisi petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	ANDRIAN JEREMY MARULITUA SIGALINGGING
2.	Instansi/Perusahaan	:	<del>VKBB</del> UBB
3.	No. HP	:	081367937701
4.	Alamat e-Mail	:	andriangeremy12@gmail.com
5.	Umur (tahun)	:	20 Tahun
6.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
7.	Pendidikan terakhir	:	SLTA
8.	Pekerjaan Utama	:	Kukuh
9.	Domisili	:	Balunyur

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK:**

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang ( ✓ ) atau tanda ( ✕ ) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i).

**KUESIONER :**

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	<p>Apakah Pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (<b>Manipulasi Peraturan</b>)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur</p> <p><input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur</p> <p><input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur</p>
2.	<p>Apakah Petugas dalam memberikan layanan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (<b>Penyalahgunaan Jabatan</b>)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan</p> <p><input type="checkbox"/> Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan</p> <p><input type="checkbox"/> Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan</p> <p><input type="checkbox"/> Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan</p>
3.	<p>Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (Pegawai Pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusn surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (<b>Menjual Pengaruh</b>)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi</p> <p><input type="checkbox"/> Jarang Dihubungi</p> <p><input type="checkbox"/> Sering Dihubungi</p> <p><input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi</p>
4.	<p>Apakah informasi tentang tarif/Biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (<b>Transaksi Biaya</b>)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selalu</p> <p><input type="checkbox"/> Sering</p> <p><input type="checkbox"/> Jarang</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Ada</p>
5.	<p>Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (<b>Biaya Tambahan</b>)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya</p> <p><input type="checkbox"/> Jarang Ada Tambahan Biaya</p>

	<input type="checkbox"/> Sering Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya
6.	<p>Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas pelayanan yang diterima? (<b>Hadiah</b>)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menolak <input type="checkbox"/> Sering Menolak <input type="checkbox"/> Jarang Menolak <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Menolak
7.	<p>Apakah menerima Bukti Transaksi Keuangan/pembayaran yang Sah setelah proses pembayaran dilakukan? (<b>Transparasi Biaya</b>)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Sering Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Jarang Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	<p>Apakah pernah mengetahui ada Praktek Percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (<b>Percaloan</b>)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
9.	<p>Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih ada Praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (<b>Perbuatan Curang</b>)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
10.	<p>Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang atau di luar prosedur? (<b>Transaksi Rahasia</b>)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu

Kuesioner ini Mohon Diisi Untuk Meningkatkan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 8 Maret

2024



(ANDRIAN JEREMY W.S.)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024

Nomor Kuesioner :  (diisi petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	Irawan Farena
2.	Instansi/Perusahaan	:	UBB
3.	No. HP	:	0831106622941
4.	Alamat e-Mail	:	irawanfarena@gmail.com
5.	Umur (tahun)	:	19 Tahun
6.	Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
7.	Pendidikan terakhir	:	SMA
8.	Pekerjaan Utama	:	Mahasiswa
9.	Domisili	:	Koba

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK:**

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang ( ✓ ) atau tanda ( ✗ ) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i).

**KUESIONER :**

<b>Pertanyaan-pertanyaan Survei</b>	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i	
Eksternal	
1.	Apakah Pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? <b>(Manipulasi Peraturan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? <b>(Penyalahgunaan Jabatan)</b> <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan <input checked="" type="checkbox"/> Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan <input type="checkbox"/> Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (Pegawai Pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusn surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? <b>(Menjual Pengaruh)</b> <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi <input checked="" type="checkbox"/> Jarang Dihubungi <input type="checkbox"/> Sering Dihubungi <input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/Biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? <b>(Transaksi Biaya)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Tidak Ada
5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? <b>(Biaya Tambahan)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Jarang Ada Tambahan Biaya

	<input type="checkbox"/> Sering Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya
6.	<p>Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas pelayanan yang diterima? <b>(Hadiah)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menolak <input type="checkbox"/> Sering Menolak <input type="checkbox"/> Jarang Menolak <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Menolak
7.	<p>Apakah menerima Bukti Transaksi Keuangan/pembayaran yang Sah setelah proses pembayaran dilakukan? <b>(Transparasi Biaya)</b></p> <input type="checkbox"/> Selalu Menerima Bukti Transaksi <input checked="" type="checkbox"/> Sering Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Jarang Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	<p>Apakah pernah mengetahui ada Praktek Percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? <b>(Percaloan)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
9.	<p>Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih ada Praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? <b>(Perbuatan Curang)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
10.	<p>Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang atau di luar prosedur? <b>(Transaksi Rahasia)</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu

Kuesioner ini Mohon Diisi Untuk Meningkatkan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pangkalpinang, *Jumart, 8 Maret* 2024



( Irawan Farais )



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
Tahun 2024**

Nomor kuesioner :    (diisi oleh petugas)

**IDENTITAS RESPONDEN :**

1.	Nama	:	RUSKIAN S
2.	Instansi/Perusahaan	:	
3.	No. Hp.	:	
4.	Alamat e-Mail	:	RUSKIAN@yahoo.com
5.	Umur (tahun)	:	58
6.	Jenis Kelamin	:	Laki laki
7.	Pendidikan terakhir	:	S1
8.	Pekerjaan Utama	:	lawyer
9.	Domisili	:	Jkt

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK :**

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

**KUESIONER :**

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) <input checked="" type="checkbox"/> Petugas melayani tanpa meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani jarang meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani sering meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi <input type="checkbox"/> Jarang Dihubungi <input type="checkbox"/> Sering Dihubungi <input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Jarang Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Sering Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Selalu Ada Tambahan Biaya
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menolak <input type="checkbox"/> Sering Menolak <input type="checkbox"/> Jarang Menolak <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Menolak
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Sering Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Jarang Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu

Pangkalpinang, Januari 2024

(RUSKI S.)



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
Tahun 2024**

Nomor kuesioner :    (diisi oleh petugas)

**IDENTITAS RESPONDEN :**

1.	Nama	:	Uden Zaenudin
2.	Instansi/Perusahaan	:	Law Office Afif Suherman & Associates
3.	No. Hp.	:	0812.8297.6882
4.	Alamat e-Mail	:	ahel392@gmail.com
5.	Umur (tahun)	:	50
6.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
7.	Pendidikan terakhir	:	S-1
8.	Pekerjaan Utama	:	Pengacara
9.	Domisili	:	Jakarta

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK :**

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

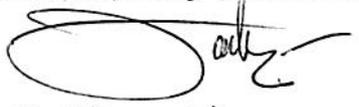
**KUESIONER :**

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) <input checked="" type="checkbox"/> Petugas melayani tanpa meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani jarang meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani sering meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi <input type="checkbox"/> Jarang Dihubungi <input type="checkbox"/> Sering Dihubungi <input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Jarang Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Sering Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Selalu Ada Tambahan Biaya
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menolak <input type="checkbox"/> Sering Menolak <input type="checkbox"/> Jarang Menolak <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Menolak
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Sering Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Jarang Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu

Pangkalpinang, Januari 2024

  
U. Zenudin



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
Tahun 2024**

Nomor kuesioner :    (diisi oleh petugas)

**IDENTITAS RESPONDEN :**

1.	Nama	:	FIRDAUSYAH
2.	Instansi/Perusahaan	:	USA MAMBALONG
3.	No. Hp.	:	0852 6872 2873
4.	Alamat e-Mail	:	
5.	Umur (tahun)	:	40 th
6.	Jenis Kelamin	:	Laki Laki
7.	Pendidikan terakhir	:	S1
8.	Pekerjaan Utama	:	Melayan
9.	Domisili	:	Dusun Mambalong.

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK :**

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

**KUESIONER :**

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) <input checked="" type="checkbox"/> Petugas melayani tanpa meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani jarang meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani sering meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi <input type="checkbox"/> Jarang Dihubungi <input type="checkbox"/> Sering Dihubungi <input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) <input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Jarang <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada





**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
Tahun 2024**

Nomor kuesioner :    (diisi oleh petugas)

**IDENTITAS RESPONDEN :**

1.	Nama	: SYUKRI SYAHRIYAH
2.	Instansi/Perusahaan	: -
3.	No. Hp.	: -
4.	Alamat e-Mail	: NOMBANG BELITUNG
5.	Umur (tahun)	: 74 THA
6.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
7.	Pendidikan terakhir	: S.S.
8.	Pekerjaan Utama	: TANI
9.	Domisili	: NOMBANG BELITUNG

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK :**

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

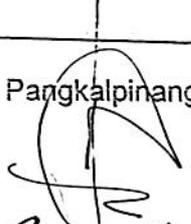
**KUESIONER :**

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) <input checked="" type="checkbox"/> Petugas melayani tanpa meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani jarang meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani sering meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi <input type="checkbox"/> Jarang Dihubungi <input type="checkbox"/> Sering Dihubungi <input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) <input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Jarang <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) <input type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Jarang Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Sering Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Selalu Ada Tambahan Biaya <i>TIDAK TAU</i>
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) <input type="checkbox"/> Selalu Menolak <input type="checkbox"/> Sering Menolak <input type="checkbox"/> Jarang Menolak <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Menolak <i>TIDAK TAU</i>
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparansi Biaya) <input type="checkbox"/> Selalu Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Sering Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Jarang Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi <i>TIDAK TAU</i>
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu <i>TIDAK TAU</i>
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu

Pangkalpinang, Januari 2024

  
( Syukri Sjaharudin )



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
Tahun 2024**

Nomor kuesioner :    (diisi oleh petugas)

**IDENTITAS RESPONDEN :**

1.	Nama	: SUMANTRI
2.	Instansi/Perusahaan	: Pemerintah Desa Padang Kondis.
3.	No. Hp.	: 0878-9049-9218
4.	Alamat e-Mail	: Desa Padang Kondis, Belitung
5.	Umur (tahun)	: 53 tahun
6.	Jenis Kelamin	: Laki - Laki
7.	Pendidikan terakhir	: SLTA
8.	Pekerjaan Utama	: Kepala Desa Padang Kondis
9.	Domisili	: Desa Padang Kondis

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK :**

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

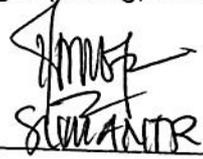
**KUESIONER :**

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) <input checked="" type="checkbox"/> Petugas melayani tanpa meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani jarang meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani sering meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi <input type="checkbox"/> Jarang Dihubungi <input type="checkbox"/> Sering Dihubungi <input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) <input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Sering <input checked="" type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Jarang Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Sering Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Selalu Ada Tambahan Biaya
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menolak <input type="checkbox"/> Sering Menolak <input type="checkbox"/> Jarang Menolak <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Menolak
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Sering Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Jarang Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu

Pangkalpinang, Januari 2024

  
(Sumandi)



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
Tahun 2024**

Nomor kuesioner :    (diisi oleh petugas)

**IDENTITAS RESPONDEN :**

1.	Nama	:	Eddy Supriyadi
2.	Instansi/Perusahaan	:	PT. Green Forestry Indonesia
3.	No. Hp.	:	0812 7390 0165
4.	Alamat e-Mail	:	
5.	Umur (tahun)	:	51 Tahun
6.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
7.	Pendidikan terakhir	:	SMK
8.	Pekerjaan Utama	:	Petani
9.	Domisili	:	Membalong

Jenis Pelayanan :

**PETUNJUK :**

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- Cara Pengisian Kuesioner :  
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

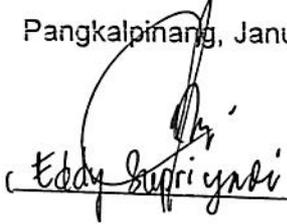
**KUESIONER :**

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) <input checked="" type="checkbox"/> Selalu Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) <input checked="" type="checkbox"/> Petugas melayani tanpa meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani jarang meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani sering meminta imbalan <input type="checkbox"/> Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah Dihubungi <input type="checkbox"/> Jarang Dihubungi <input type="checkbox"/> Sering Dihubungi <input type="checkbox"/> Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) <input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Jarang <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) <input type="checkbox"/> Tidak Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Jarang Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Sering Ada Tambahan Biaya <input type="checkbox"/> Selalu Ada Tambahan Biaya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Tau
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) <input type="checkbox"/> Selalu Menolak <input type="checkbox"/> Sering Menolak <input type="checkbox"/> Jarang Menolak <input type="checkbox"/> Tidak Pernah Menolak <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Tau
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparansi Biaya) <input type="checkbox"/> Selalu Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Sering Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Jarang Menerima Bukti Transaksi <input type="checkbox"/> Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Tau
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Pernah <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu

Pangkalpinang, Januari 2024

  
( Eddy Supriyadi )